

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, diperoleh temuan mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat. Temuan tersebut kemudian dirumuskan dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Kampiri

Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kampiri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan berdasarkan RKPDes secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Pelaksanaan anggaran menggunakan sistem non-tunai melalui rekening kas desa dengan mekanisme SPP yang diverifikasi secara berjenjang sehingga mencerminkan pengendalian internal yang baik. Penatausahaan dilakukan secara tertib menggunakan aplikasi Siskeudes, sedangkan pelaporan dan pertanggungjawaban disampaikan secara berkala kepada pemerintah daerah serta dipublikasikan kepada masyarakat melalui

media informasi desa. Secara keseluruhan, pengelolaan APBDes di Desa Kampiri telah menunjukkan tata kelola yang tertib, transparan, dan sesuai prosedur yang berlaku.

2. Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Kampiri

Transparansi pengelolaan APBDes di Desa Kampiri telah diwujudkan melalui penyampaian informasi dalam forum musyawarah desa, Musrenbangdes, papan informasi, serta baliho realisasi anggaran. Pemerintah desa juga memberikan akses langsung kepada masyarakat yang ingin mengetahui rincian anggaran. Namun demikian, transparansi belum sepenuhnya optimal pada aspek aksesibilitas informasi publik secara visual dan digital, seperti keterbatasan publikasi baliho pada tahun berjalan dan belum optimalnya pemanfaatan website desa. Dengan demikian, transparansi telah berjalan secara prosedural dan partisipatif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek publikasi informasi yang lebih luas dan mudah diakses.

3. Kontribusi Akuntabilitas dan Transparansi APBDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Kampiri berkontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat. APBDes 2025 tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada program peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan bagi pelaku UMKM. Perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang terkontrol, serta

pelaporan yang terbuka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan APBDes di Desa Kampiri tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kampiri, disarankan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan APBDes dengan memperkuat publikasi informasi anggaran secara berkelanjutan melalui media visual, seperti baliho dan papan informasi desa, serta mengoptimalkan pemanfaatan media digital, khususnya website desa, agar informasi APBDes dapat diakses secara mudah dan merata oleh seluruh masyarakat.
2. Bagi masyarakat Desa Kampiri, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam forum musyawarah desa serta memanfaatkan hak atas akses informasi publik dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan secara timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas media transparansi keuangan desa,

terutama pemanfaatan teknologi informasi, serta membandingkan praktik transparansi APBDes antar desa guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa.